

PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BLITAR: PRESPEKTIF VALUE FOR MONEY

Elisa Eka Prastiwi
elisaprastiwi@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the measurement concept of value for money is implemented in assessing the performance of Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyoof Blitar city. This research conducted by using qualitative approach. The data collection technique is carried out by using documentary and interview technique whereas the data analysis technique is carried out by using descriptive qualitative. The result of research shows the hospital has successfully achieved the expected efficiency and effectiveness level. The efficiency performance considered from comparison between input and output in which work program plan and activity of agency can be achieved and realized in accordance with expected target. Meanwhile, the effectiveness performance can be seen from the results of achievement input and output in objectives can be realized in accordance with the expected target. Even though the efficiency and the effectiveness of performance the hospital can be achieved, nevertheless the development to performance indicator value for money is needed. So, it can explain comprehensively performance achievement the hospital either it is seen from management capability in obtaining and using their economic resources or the capability in achieving operational objectives.

Keywords: *Performance, Hospital, Value for Money*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pengukuran *value for money* diterapkan dalam menilai kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah berhasil mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Kinerja efisiensi dilihat dari perbandingan antara *output* dengan *input*, dimana rencana program kerja dan kegiatan instansi dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan kinerja efektivitas dapat dilihat dari hasil-hasil pencapaian *output* dan *outcome* dalam mencapai suatu tujuan organisasi, dimana hasil kegiatan untuk mencapai tujuan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang di harapkan. Meskipun kinerja efisiensi dan efektivitas rumah sakit tercapai, namun demikian masih diperlukan pengembangan terhadap indikator kinerja *Value For Money*, sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif capaian kinerja rumah sakit, baik dilihat dari kemampuan manajemen dalam mendapat dan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki, mampu dalam mencapai tujuan operasional.

Kata kunci: *Kinerja, Rumah Sakit, Value For Money*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu wewenang, kewajiban, dan hak bagi daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang 32 Tahun 2004). Pemerintah daerah melakukan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangannya, yang merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan pengalihan dan penyerahan pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang ada dalam rangka pemusatan (desentralisasi) fiskal. Kewenangan yang memanfaatkan sumber daya

keuangan yang dimiliki sendiri dilakukan melalui cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Semangat dalam melakukan pembaruan terutama dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang berusaha untuk mensinergikannya dengan penyelenggaraan *good governance*, antara lain dengan diperkenalkannya *result oriented accountability* yang lebih dikenal dengan akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk evaluasi adalah dengan melakukan penilaian kinerja, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap terlaksananya anggaran dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Menurut Mardiasmo (2009; 131), *Value For Money* merupakan suatu konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga unsur elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan *Input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana suatu organisasi sektor publik dapat meminimalisir *Input resources* yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros (*inefisien*). Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *Input* tertentu atau penggunaan *Input* yang terendah untuk pencapaian *output* tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian dari hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara singkat, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *Value For Money* yang saling terikat. Ketiga hal tersebut perlu ditambahkan dua elemen lagi yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*).

Ilham (2006) Analisis kinerja keuangan belanja kegiatan dengan pendekatan *Value For Money* pada sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas, berdasarkan hasil pengukuran pada indikator masukan (*Input*) menunjukkan bahwa biro-biro yang terdapat pada instansi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2004 tidak menggunakan semua *Input* dana direncanakan untuk setiap kegiatan, sedangkan jika dilihat dari pengukuran indikator keluaran (*output*) dapat dilihat bahwa sebagian besar target pencapaian fisik berhasil direalisasikan. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran hasil (*outcome*) dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan umumnya merasa puas dengan pencapaian rata-rata 70%.

Nilnasari (2009) meneliti "Analisis Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto". Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja pada dinas pendidikan kabupaten Mojokerto masih berorientasi pada *input*, kendala yang dihadapi dalam pengukuran kinerja adalah belum optimalnya sumber daya manusia, kurangnya pelaksanaan diklat, belum optimalnya system informasi manajemen, kurangnya data yang akurat, pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada masukan. Selain itu standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga menimbulkan masalah, karena setiap unit kerja memiliki karakteristik yang unik dan spesifik.

Rumah Sakit Daerah Kota Blitar merupakan salah satu instansi yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Blitar yang bertugas memberikan layanan dalam hal penyediaan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan pada wilayah kerjanya, Rumah Sakit Daerah Kota Blitar merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Fasilitas umum yang disediakan oleh Rumah Sakit Daerah Kota Blitar merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan warga, apalagi dengan wilayah kerja yang berada di

salah satu kota yang kecil dengan keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan dibandingkan dengan yang ada di kota besar lainnya, pastinya kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang menunjang sangat mutlak dibutuhkan. Permasalahan yang muncul adalah, bagaimana kinerja Rumah sakit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Menilai Kinerja Rumah Sakit Daerah Kota Blitar dalam Prespektif *Value For Money*.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep pengukuran *Value For Money* diterapkan dalam menilai kinerja Rumah Sakit Daerah Kota Blitar.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Pengertian Kinerja

Marwansyah (2010: 228), berpendapat bahwa kinerja adalah pencapaian prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Menurut Otley dalam Mahmudi (2007: 6), kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Definisi kinerja dalam buku (Bastian, 2006: 329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program dalam wujud sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2007: 7), Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kerja untuk masa yang akan datang. Berapa besar target yang menjadi acuan dalam pencapaian pada periode yang akan datang. Juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

Manfaat dan Tujuan Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009: 122): (1) Memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. (2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. (3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. (4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishmen*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. (5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. (6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. (7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. (8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sector public adalah: (1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*). (2) Untuk mengukur kinerja financial dan non-financial secara lebih berimbang sehingga dapat ditelusuri

perkembangan pencapaian strategi. (3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan (4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Aspek Pengukuran kinerja

Beberapa aspek dari pengukuran kinerja (Bastian, 2006: 331): (1) Financial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap instansi pemerintahan. (2) Kepuasan Pelanggan (*customer satisfacation*), yaitu bagaimana instansi pemerintah merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus menerus. (3) Operasi Bisnis Internal, ditunjukkan untuk informasi bisnis internal guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (*in-concert*) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis. (4) Kepuasan Pegawai dalam Setiap Organisasi, pegawai merupakan asset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi dan peran strategis. (5) Kepuasan Kontinuitas dan Stakeholders, informasi dan pengukuran kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholder. (6) Waktu, ukuran waktu merupakan variable penting dalam desain pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat guna membantu dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

Pengertian dan Peranan Indikator Kinerja

Pengertian indikator kinerja berdasarkan penyampaian Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (LAN BPKP, 2000: 5) diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun peranan indikator kinerja bagi pemerintah sebagai berikut: (a) Untuk membantu memperjelas tujuan suatu organisasi. (b) Untuk mengevaluasi target akhir (*finaloutcome*) yang dihasilkan. (c) Sebagai masukan untuk menentukan skema intensif manajerial. (d) Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan. (e) Untuk menunjukkan standar kinerja. (f) Untuk menunjukkan efektifitas. (g) Untuk membantu menentukan efektifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran. (h) Untuk menentukan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

Elemen-Elemen Indikator Kinerja

Pertama, Indikator Masukan, *Input* adalah suatu jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan sebuah *output*. *Input* dapat dibedakan menjadi *Input* primer (kas) dan *Input* sekunder (bahan baku, SDM, dan infrastruktur). Pengukuran *Input* adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh proses dalam rangka menghasilkan *output*. Proses tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas. Ukuran *Input* mengidentifikasikan jumlah sumber daya yang akan dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas, atau organisasi. Pengukuran *Input* dilakukan untuk mengetahui harga per unit dengan membandingkan *Input* sekunder dengan *Input* primer. Indikator *Input* yang digunakan adalah indikator financial berupa anggaran, indikator *Input* tersebut diperlukan untuk mengukur tingkat ekonomi.

Kedua, Indikator Keluaran (*output*). *Output* merupakan hasil langsung dari suatu proses. Semisal, jumlah operasi yang dilakukan oleh dokter bedah, jumlah lulusan perguruan tinggi, dan panjang jalan yang dibangun. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program kegiatan. Pengukuran *output* berbentuk kuantitatif keuangan dan kuantitatif non keuangan.

Ketiga, Indikator Hasil (*outcome*), *Outcome* mengukur apa yang telah dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa target kinerja yang ingin dicapai, sedangkan *outcome* adalah hasil nyata atas apa yang telah dicapai. Tujuan pengukuran *outcome* adalah untuk mengukur nilai kualitas *output* dari suatu aktivitas atau program. Kualitas *output* dalam arti yang lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian pengukuran *outcome* adalah pengukuran dampak sosial suatu aktivitas atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi sector publik terhadap masyarakat.

Pengembangan Indikator Kinerja

Menurut Mahsun (2006: 73) pengukuran indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut : pertama, **biaya pelayanan**, penentuan indikator kinerja harus mencakup indikator biaya, biasanya dinyatakan dalam biaya per unit. Indikator biaya ini merupakan elemen penting untuk mengukur ekonomi dan efisiensi. Indikator biaya bersifat kuantitatif dan financial. Manfaat indikator biaya adalah untuk menilai kelayakan tarif pelayanan dengan tingkat pelayanan yang diberikan serta untuk melakukan analisis keuangan.

Kedua, **tingkat pemanfaatan (*utilization rate*)**, indikator tingkat pemanfaatan (*utilisasi rate*) diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kapasitas yang menganggur (*idle capacity*) atas sumber daya yang dimiliki organisasi. Tingkat utilitas dapat diketahui dengan cara membandingkan tingkat pemanfaatan dengan kapasitas yang tersedia atau membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (*supply of service*) dengan permintaan publik (*publik demand*). Adanya kapasitas yang menganggur pada dasarnya akan menjadikan organisasi tidak efektif dan efisien. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya berupa presentase tertentu, misalnya pada presentase penggunaan kapasitas.

Ketiga, **kualitas dan standar pelayanan (*quality and standart*)**, selain indikator yang sifatnya kuantitatif, penentuan indikator kinerja juga harus mencakup indikator yang sifatnya kualitatif, misalnya indikator kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas pelayanan ini semisal kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan respon, keramahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan, keindahan (*estetika*), etika, dan sebagainya. Sedangkan standar pelayanan terkait dengan tingkat pelayanan minimal yang harus diberikan. Pada dasarnya tujuan dibuatnya standar pelayanan adalah untuk memberikan pelayanan public yang manusiawi, menjadikan pelanggan sebagai subjek yang harus dilayani dengan penuh hormat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik terdapat standar mutu internasional (ISO).

Pengertian Anggaran Kinerja

Secara umum terdapat berbagai definisi tentang anggaran kinerja. Bastian (2006: 92) mengatakan anggaran kinerja merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan unit *cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Maksud terstruktur disini dimulai dari pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Intisari dari definisi tersebut adalah pada dasarnya merujuk bahwa melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yang menyajikan informasi kinerja secara bersamaan dengan jumlah dana yang dibutuhkan akan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan (penganggaran). Hal ini disebabkan oleh fokus alokasi anggaran akan lebih diarahkan pada hasil-hasil yang diinginkan.

Pengertian Value For Money

Value For Money (VFM) merupakan konsep penting dalam organisasi sector publik. Meskipun sama-sama menggunakan kata *value* dan *money*, konsep *Value For Money* sangat berbeda pengertiannya dengan konsep *Value Of Money*. *Time Value Of Money* memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *Value For Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang (Mahmudi, 2007: 89). *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sector publik yang berdasarkan oleh tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, efektif. Pertama, **ekonomi**, dalam arti kehematan yang mencakup pada kehati-hatian dan kecermatan. Dalam pengadaaan alokasi sumber daya, serta perolehan *Input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *Input* dengan *value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait pada sejauh mana organisasi tersebut dapat meminimalisir *Input Resources* yang diguakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi menggambarkan hubungan antara harga pasar dan masukan (*cost of Input*) atau dengan kata lain ekonomi merupakan pembelian barang dan jasa *Input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan.

Kedua, **efisien**, berhubungan erat dengan dengan konsep produktiifitas dalam arti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisiensi merupakan perbandingan *output/Input* yang digunakan dengan kaitan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikattakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Ketiga, **efektifitas**, pada dasarnya berhubungan dengan tujuan dan sasaran dari target kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok dari *Value For Money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa ketiga elemen saja masih dirasa belum cukup. Perlu ditambahkan dengan dua elemen lain yaitu kedilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*).

Pengukuran Value For Money

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran *Value for Money* adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada akktivitas operasinal organisasi dilakukan dengan menggunakan beberapa pengukuran, diantaranya : **Pengukuran Ekonomi**, Ekonomi merupakan perbandingan *Input* dengan *Input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *Input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*Input*) yang digunakan.

Pengukuran Efisiensi, Efisiensi dapat diukur dengan ratio *output* dan *Input*. Semakin besar ratio berarti semakin tinggi nilai efisiensi. Dalam pengukuran indicator *Value For Money* efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu : efisiensi alokasi dan efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *Input* pada kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan

kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada *output* tertentu. Dalam organisasi sector publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya sebagai bentuk standar biaya yang digunakan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya. Penetapan standar belanja tersebut sebelumnya juga sudah harus mempertimbangkan aspek ekonomi serta standar pelayanan minimum yang dipenuhi.

Pengukuran Efektifitas, Efektifitas dapat diukur dengan rasio antara *outcome* dan *output*, berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dapat diukur dengan tingkat efektifitas organisasi tersebut. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Manfaat Value For Money pada Sektor Publik

Manfaat implementasi konsep *Value For Money* pada organisasi sector publik antara lain (Mardiasmo, 2009: 7): (1) meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. (2) meningkatkan mutu pelayanan public. (3) menurunnya biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *Input*. (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public. (5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas public.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini di rancang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai kenyataan ataupun fakta yang ada pada saat diadakan penelitian.

Rumah Sakit Daerah Kota Blitar yaitu salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah daerah Kota Blitar yang memberikan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam perkembangannya sejak awal didirikan tahun 1949 Rumah Sakit Daerah Kota Blitar mengalami metamorfosis besar-besaran pada awal tahun 2000-an dimana pada tahun itu mulai dikembangkannya pembangunan dan pengembangan pelayanan di RSD kota Blitar dikarenakan keprihatinan pemerintah daerah dengan kondisi RSD Kota Blitar yang tidak layak digunakan.

Teknik Pengumpulan Data

Survey Pendahuluan, Peneliti melakukan kunjungan awal pada obyek penelitian untuk mengetahui gambaran secara umum obyek penelitian serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

Survey Lapangan, Peneliti melakukan tinjauan langsung pada obyek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti: (1) Wawancara mendalam secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten dengan pelaporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar. (2) Dokumentasi, merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat langsung dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti, seperti mengumpulkan data-data obyek penelitian dari tempat obyek penelitian berupa gambaran umum obyek penelitian, profil perusahaan, meliputi gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, lokasi dan bentuk perusahaan, struktur organisasi serta visi dan misi perusahaan, laporan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Blitar.

Satuan Kajian

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian, obyek penelitian yang dibutuhkan: (1) **Penilaian Kinerja**, Mahmudi (2007: 7), Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan. (2) *Value For Money*, Terdapat tiga unsur elemen utama yang digunakan dalam pengelolaan konsep *Value For Money*, yaitu :

Ekonomi, Adalah hubungan antar pasar dan masukan (*cost of Input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa *Input* dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan. Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Efisiensi, Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *Input* yang di gunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat di capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efektifitas, Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dari uraian di atas, bahwa ketiga pokok bahasan dalam *Value For Money* sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan (*Input*) dan keluaran (*output*), dan efektifitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Jika suatu program efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektifitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektifitas dan memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan dan mengidentifikasi data penelitian pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo baik kegiatan operasional manajerial dan program kerja maupun target yang hendak di capai. (2) Mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian. (3) Pembahasan pelaporan kinerja dan penilaian kinerja instansi pemerintah deskripsi data dan berlandaskan teori yang relevan. Memberikan simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berikut ini terdapat data-data terkait mengenai kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilakukan Rumah Sakit Daerah (RSD) Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2012 berdasarkan tinjauan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan mengacu pada indikator kinerjanya yang terdiri dari indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*).

Tabel 1
Data Realisasi Anggaran RSD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2011

No	Kegiatan	Anggaran DPA APBD SKPD	Realisasi	
			(Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung			
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	15.889.890.490	17.323.067.431	102,6
II	Belanja Langsung			
1	Pelayanan administrasi perkantoran	12.032.378.067	11.357.456.257	94,38
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.483.633.250	1.328.517.685	89,54
3	Programn Peningkatan pengembangan soisystem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	92.133.000	71.993.450	77,49
4	Standarisasi pelayanan kesehatan	129.222.500	95.503.600	73,91
5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru	40.646.449.418	41.815.654.054	98,85
6	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah	322.868.800	169.732.350	52,55
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	771.681.500	679.145.977	87,89
JUMLAH		71.368.257.025	72.840.470.804	102,06

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui dari total anggaran yang tersedia pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebesar Rp 71.368.257.025 pada tahun 2011 yang terealisasi Rp 72.840.470.804 atau 102,06%. Realisasi anggaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja, akan tetapi karena Rumah Sakit sebagai instansi yang BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sudah lebih leluasa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan.

Tabel 2
Data Realisasi Anggaran RSD Mardi Waluyo Kota Blitar
Tahun 2012

No	Kegiatan	Anggaran DPA APBD SKPD	Realisasi	
			(Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung			
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	21.184.339.790	20.748.251.539	87,94
II	Belanja Langsung			
1	Pelayanan administrasi perkantoran	11.446.479.714	12.321.955.812	107,65
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.279.087.300	1.212.053.510	94,76

3	Programn Peningkatan pengembangan soisytem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	422.170.000	356.830.977	84,52
4	Standarisasi pelayanan kesehatan	457.170.000	457.170.000	100
5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru	18.537.658.401	22.184.842.996	119,67
6	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit	1.234.173.550	1.083.763.564	87,81
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	874.010.000	836.883.001	95,75
JUMLAH		55.435.088.755	59.170.868.499	106,79

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui dari total anggaran yang tersedia pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Mardi Waluyo Kota Blitar sebesar Rp 55.435.088.755 pada tahun 2012 yang terealisasi Rp 59.170.868.499 atau 106,79%. Realisasi anggaran pada tahun 2012 melebihi pagu dikarenakan: a) Belanja sesuai dengan kebutuhan, b) Adanya penambahan layanan, c) Peningkatan kualitas instruktur pelayanan dengan penambahan peralatan medis, penambahan luas ruangan dan pemenuhan sarana prasarana dengan kebutuhan sehingga pendapatan rumah sakit meningkat.

Tabel 3
Data Pencapaian Kinerja Program RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar
Tahun Anggaran 2012

No	Program	Hasil Kinerja (%)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	94,57
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	95,57
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96,87
4	Program standarisasi pelayanan kesehatan	95,51
5	Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit	99,48
6	Program pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit	76,93
7	Program kimitraan peningkatan pelayanan kesehatan	95,97
Rata-rata		92,65

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Melihat dari hasil capaian di atas, RSD Mardi Waluyo" Kota Blitar tahun 2012 mencapai hasil kinerja sebesar 92,65%. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 88,78% artinya pada tahun 2012 mengalami peningkatan sedikit dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 3,87%.

Hasil dari pelaksanaan kinerja kegiatan RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan hasil kegiatan: penyediaan air, telepon dan listrik, jaminan pemeliharaan kesehatan PNS beresiko, terjaganya kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan komponen instalsi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makan dan minum rapat, terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dan penyediaan pelayanan kesehatan tahun 2012. (2) Program peningkatan sarana prasarana aparatur, dengan hasil: pengadaan mebelair, pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional. (3) Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan hasil: penyusunan program kegiatan pelaporan dan evaluasi RS, pengelolaan dan pinatausahaan keuangan BLUD. (4) Program standarisasi pelayanan kesehatan, dengan hasil kegiatan: pembangunan dan pemutakhiran data dasar standart pelayanan kesehatan. (5) Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit, dengan hasil: pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan obat-obatan, pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit, pengadaan bahan logistic rumah sakit, pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit, pembangunan rmah sakit, pengadaan alat kesehatan. (6) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dengan hasil: pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, pemeliharaan rutin/berkala IPAL rumah sakit, alat kesehatan rumah sakit. (7) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan hasil kegiatan: kemitraan asuransi kesehatan masyarakat, kimitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis dan kemitraan pengobatan pasien kurang mampu.

Kinerja RSD Mardi Waluyo Kota Blitar di Tinjau dari Ekonomi.

Ekonomi adalah hubungan antara harga pasar dan masukan (*cost of input*). Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang di mungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional yang dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu (Ulum, 2004:290).

Pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik yang di ukur dari tinjauan ekonomi merupakan penilaian kinerja organisasi untuk menilai apakah suatu kegiatan operasi telah dijalankan secara ekonomis atau secara hemat. Kegiatan operasi yang dijalankan secara ekonomis adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkat biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang ingin dicapai.

Program pelayanan administrasi perkantoran

Tabel 4

Data Pencapaian Target Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	92,26
2	Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS bersiko	100	99,79
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	99,89
4	Penyediaan alat tulis kantor	100	81,69
5	Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan kantor	100	93,59
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	70,03
7	Penyediaan mkanan dan minuman	100	103,66
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100	101,71
9	Jasa Pilkes Non PNS	100	108,54
Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran Program administrasi perkantoran			94,57

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 94,57% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tabel 5
Data Pencapaian Target Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Pengadaan Mebeair	100	100
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	93,27
3	Pengadaan suku cadang kendaraan dinas/operasional	100	99,35
4	Pemeliharaan mebelair	100	85,38
5	Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	100	99,87
Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran Program Sarana Prasarana Aparatur			95,57

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program peningkatan sarana prasarana aparatur pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 95,57% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Tabel 6
Data Pencapaian Target Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan
RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Penyusunan program kegiatan pelaporan dan Evaluasi RS	100	83,48
2	Pengelolaan dan penatausahaan BLUD	100	89,87
Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran Program Sarana Prasarana Aparatur			96,87

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja keuangan pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 96,87% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tabel 7
Data Pencapaian Target Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Pengembangan dan pemutakhiran dasar standart pelayanan kesehatan	100	95,51
Rata-rata Pencapaian Kinerja			95,51

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program standarisasi pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 95,51% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS paru-paru

Tabel 8
Data Pencapaian Target Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana
RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Pengadaan Alkes RS	100	94,02
2	Pengadaan Obat-obatan RS	100	116,31
3	Pengadaan perlengkapan RT RS (dapur, r. pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)	100	98,55
4	Pengadaan bahan-bahan logistic Rumah sakit	100	112,52
5	Pengadaan percetakan admin dan surat menyurat	100	82,73
6	Pengadaan sarana prasarana RS	100	99,53
7	Pengadaan alkes RS (Subsidi APBD)	100	92,64
Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS			99,48

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS paru-paru pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 99,48% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

Tabel 9
Data Pencapaian Target Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	100	89,74
2	Instansi pengolahan limbah RS	100	46,34
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit (kalibasi)	100	94,70
Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS			76,93

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 76,93% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Tabel 10
Data Pencapaian Target Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar Tahun 2012

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Kemitraan asuransi	100	89,34
2	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic	100	92,49
3	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	100	106,09
Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			95,97

Sumber: Laporan Keuangan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada RSUD Kota Blitar mencapai realisasi sebesar 95,97% dari target semula yang ditetapkan sebanyak 100%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa RSUD Kota Blitar telah melaksanakan program dengan biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang dicapai.

Secara umum RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2011-2012. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing Bidang/Sub Bagian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah "Mardi Waluyo" Kota Blitar secara umum lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator output, namun secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar program-program yang dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut dapat diukur keberhasilannya dari sisi hasil (*outcom*).

Berdasar tabel 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 di atas dapat di ketahui bahwa kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di tinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat pada jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat, lebih kecil dari hasil realisasinya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kota Blitar dapat terealisasi dengan baik, dan dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, dan merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari instansi pemerintah, untuk memberikan pelayanan dari program yang dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat dengan biaya yang rendah. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Drg. Christine (Plt wakil direktur umumdand keuangan) RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar yang menyatakan:

"... antara anggaran dengan realisasi selalu berbeda setiap tahun di karenakan sesuai kebutuhan Rumah Sakit, misalnya dalam belanja rumah sakit sesuai kebutuhan, bila ada penambahan pelayanan serta peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan biasanya disertai dengan penambahan peralatan medis maupun pemenuhan sarana prasarana. Dan jika ada perbedaan antara anggaran dengan realisasi maka sisanya akan di kembalikan ke kas daerah.

Dengan demikian dari tahun ke tahun antara realisasi dengan anggaran selalu di tekan seminimal mungkin sehingga selalu lebih kecil realisasi daripada anggaran sehingga dapat di katakan ekonomis. Pelayanan RSD Mardi Waluyo di kota Blitar dapat terealisasi dengan baik, dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, serta merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari RSD Mardi Waluyo Kota Blitar yang tertuang dalam Restra, untuk memberikan pelayanan kesehatan dari program yang dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat dengan biaya yang rendah.

Kinerja RSD Mardi Waluyo Kota Blitar di Tinjau dari efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Ulum, 2004:291).

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dikatakan efisien jika dapat menghasilkan *output* dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan *input* yang serendah-rendahnya. Sehingga suatu instansi pemerintah dapat dikatakan efisien jika suatu input tertentu dengan biaya yang minimal dapat menghasilkan *output* dengan hasil yang maksimal.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 pengukuran kinerja kegiatan yang telah dijelaskan diatas dapat di ketahui bahwa kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2011 sampai tahun 2012 secara umum dapat di nilai efisien. Atau Indikator efisiensi terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan. Kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dalam merealisasikan kegiatan maupun programnya dengan menggunakan sumber keuangan yang ada pada tabel 1 dan 2 untuk mencapai hasil pencapaian kinerja sesuai target atau sesuai dengan perencanaan yang telah diwujudkan dalam rencana Strategis. Dapat dilihat dari salah satu pencapaian kinerja pada 7 program kerja yang tertuang dalam rencana strategis rata-rata mencapai 92,65% (tabel 3). Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan

atau programnya dikatakan efisien jika mampu menghasilkan output tertentu tertentu dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Drg. Christine.

“... dengan adanya input sumber dana yang seminimal mungkin bisa di dapat hasil output yang maksimal atau lebih dari rencana target hal ini dapat di tekan biaya pemasarannya tetapi dari pemasaran tersebut masyarakat dapat mengetahui tujuan dari program yang dilakukan RSD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Dengan demikian, dari input yang seminimal mungkin dapat di peroleh hasil output yang maksimal sehingga output yang di hasilkan dari tahun ke tahun lebih dari rencana dari target awal, sehingga kinerja Rumah sakit Umum Daerah Mardi waluyo Kota Blitar selama tahun 2011 sampai tahun 2012 dapat dikatakan efisien.

Kinerja RSD Mardi Waluyo Kota Blitar di Tinjau dari efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang di tetapkan (Ulum, 2004:291).

Berdasarkan tabel 3 pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSD) Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2011-2012 secara umum dapat di nilai efektif karena rencana program kerja dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang di wujudkan dalam indikator kinerja *output* maupun *outcome* telah berhasil menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasikan program sesuai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hasil-hasil capaian kinerja indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*), maupun dampaknya yang ada di tabel 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSD) Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai organisasi sektor publik yang menangani pelayanan publik di bidang kesehatan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Di dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan (terlampir) tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, salah satu program adalah pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit yang mencapai 99,48%, sehingga program kesehatan yang tertuang dalam rencana strategis telah dilaksanakan dan dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Drg. Christine.

“...dengan adanya program pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit yang dilakukan RSD “Mardi Waluyo” Kota Blitar, maka tujuan keberhasilan program dapat di ketahui dari *outcome* nya karena banyaknya masyarakat sekitar yang berobat kerumah sakit ini selain itu rumah sakit ini sebagai rujukan tingkat pertama untuk wilayah Blitar dan sekitarnya sehingga kegiatan pelayanan mencapai tingkat keberhasilan dari yang telah direncanakan untuk mensukseskan kegiatan RSD sebagai Badan Layanan Umum Daerah”.

Dengan demikian dari tahun ke tahun Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dalam melaksanakan tujuan keberhasilan program dapat terlihat dari *outcome* nya dan program yang menjadi tujaun dari program RSD Mardi Waluyo Kota Blitar juga mencapai tingkat keberhasilan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan tujuan maupun program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2011sampai dengan tahun 2012 dikatakan efektif.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dalam penyajian pelaporan kinerja RSD Mardi Waluyo Kota Blitar sudah disajikan sesuai dengan pedoman dalam Inpres No7 tahun 1999, disebutkan bahwa laporan kinerja berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaporan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar dalam menyajikan pelaporan kinerja dikatakan sudah sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan. (2) Dalam menilai kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar menggunakan *value for money*, dengan instrumen penilaian adalah ekonomis, efisiensi dan efektivitas. (3) Berdasarkan hasil penelitian pada kinerja RSD Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2012 ditinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang disiapkan untuk mendapatkan hasil mampu dilaksanakan dengan biaya minimum namun tidak mengubah standart yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga RSD tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang dibuat lebih kecil dari hasil realisasinya. (4) Ditinjau dari efisiensi berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Sakit Daerah Kota Blitar pada tahun 2012 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Indikator efisien dapat dilihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari setiap indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan dalam hal ini adalah anggaran. (5) Ditinjau dari efektivitasnya, berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Rumah Sakit Daerah Kota Blitar pada tahun 2012 secara keseluruhan dapat dinilai efektif, karena adanya rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi diwujudkan dalam indikator kinerja output maupun outcome telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasikan program sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Hal ini tampak dari hasil-hasil realisasi pencapaian indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*).

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Meskipun kinerja efisiensi dan efektivitas rumah sakit tercapai, namun demikian masih diperlukan pengembangan terhadap indikator kinerja *Value For Money*, sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif capaian kinerja rumah sakit, baik dilihat dari kemampuan manajemen dalam mendapat dan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki, mampu dalam mencapai tujuan operasional. (2) Keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar selama tahun 2012 lebih di jadikan motivasi bagi seluruh pegawai Rumah Sakit agar selalu meningkatkan kinerjanya secara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. (3) Diharapkan di dalam pencapaian output maupun *outcome* lebih ditingkatkan lagi sehingga dalam mencapai tujuan organisasi akan lebih meningkat dari tahun ke tahun. Di dalam pengalokasian anggaran dana dari tahun ke tahun ditekan seminimal mungkin, dan dengan realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Sehingga di harapkan di

dalam anggaran untuk tahun mendatang bisa lebih minimal juga seperti realisasi dari tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Cetakan 1. BPFE. Yogyakarta.
- Ilham, A. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Kegiatan Dengan Pendekatan *Value For Money* pada Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonommi Universitas Hasanudin. Makasar.
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Modul 1 sampai 5. LAN dan BPKP. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Marwansyah. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi kedua. Alfabeta. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri RI. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah. BP. Dalam Usaha Putra. Jakarta.
- Nilnasari, D. 2009. Analisis Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah pengantar*. UMM Press. Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

